

## **KONSISTENSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI FAKTOR KUNCI DALAM EFEKTIVITAS MANAJEMEN PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH**

**Nur Rulifatur Rohmah, M. Munir, Anisatul Badi'ah<sup>1</sup>**

Email: [rulifirdausi03@gmail.com](mailto:rulifirdausi03@gmail.com)

### **Abstract**

Educational management at the school level is highly influenced by the stability of government policies. This study aims to examine the importance of policy consistency as a key factor in the effectiveness of educational management, the impact of policy inconsistency on school performance, and adaptive strategies that educational institutions can implement. Using a qualitative approach through literature review, this study finds that consistent policies provide clear direction for schools in planning, implementing, and evaluating educational programs. Conversely, inconsistent policies create organizational uncertainty, weaken teacher motivation, and hinder the achievement of educational goals. To address these uncertainties, schools must develop adaptive strategies such as strengthening human resource capacity, implementing scenario-based planning, and fostering an adaptive organizational culture. This study also emphasizes that evidence-based policy formulation is a crucial prerequisite for creating an effective and sustainable education system. These findings are expected to serve as valuable input for educational policymakers in formulating more stable, relevant, and impactful educational policies for school-level management.

**Keywords:** Policy Consistency, Educational Management, School Adaptation, Evidence-Based Policy

### **Abstrak**

Manajemen pendidikan di tingkat sekolah sangat dipengaruhi oleh stabilitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya konsistensi kebijakan pendidikan sebagai faktor kunci dalam efektivitas manajemen pendidikan, dampak ketidakkonsistenan kebijakan terhadap kinerja sekolah, serta strategi adaptasi yang dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa konsistensi kebijakan memberikan arah yang jelas bagi sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pendidikan. Sebaliknya, ketidakkonsistenan kebijakan menyebabkan ketidakpastian organisasi, melemahkan motivasi guru, dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, sekolah perlu mengembangkan strategi adaptasi seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia, perencanaan berbasis skenario, serta membangun budaya organisasi yang adaptif. Penelitian ini juga menegaskan bahwa formulasi kebijakan berbasis bukti merupakan prasyarat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih stabil, relevan, dan berdampak positif terhadap manajemen pendidikan di tingkat sekolah.

**Kata Kunci:** Konsistensi Kebijakan, Manajemen Pendidikan, Adaptasi Sekolah, Kebijakan Berbasis Bukti

### **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan dan

---

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Krempyang Nganjuk

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini diharapkan dapat mencetak generasi bangsa yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu bersaing di kancah global.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, dibutuhkan manajemen pendidikan yang efektif, yang tidak hanya berorientasi pada aspek internal sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan yang konsisten dan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, manajemen pendidikan di tingkat sekolah melibatkan berbagai aktivitas yang kompleks, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pendidikan. Semua proses ini membutuhkan arah dan pedoman yang jelas dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Sayangnya, dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia, konsistensi kebijakan pendidikan masih menjadi tantangan besar. Fenomena perubahan kebijakan yang relatif sering, baik dalam skala nasional maupun regional, telah menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di tingkat satuan pendidikan.<sup>4</sup>

Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional maupun regional, seringkali terjadi perubahan kebijakan pendidikan yang signifikan. Contohnya, dalam dua dekade terakhir, sistem pendidikan Indonesia telah mengalami berbagai pergantian kurikulum: dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, beralih ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, kemudian ke Kurikulum 2013, hingga akhirnya kini diperkenalkan Kurikulum Merdeka.<sup>5</sup> Setiap perubahan ini menuntut adaptasi cepat dari pihak sekolah, guru, dan peserta didik. Namun, dalam kenyataannya, adaptasi terhadap kebijakan baru tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika perubahan tersebut dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kesiapan infrastruktur, pelatihan SDM, dan sarana pendukung lainnya.<sup>6</sup>

Konsistensi dalam kebijakan pendidikan sesungguhnya sangat diperlukan untuk memberikan landasan yang stabil bagi sekolah dalam mengelola sumber daya dan merancang program-program pendidikan jangka panjang. Menurut Edward Sallis, manajemen pendidikan yang efektif membutuhkan lingkungan yang stabil, prediktif, dan mendukung pengembangan kapasitas sekolah secara berkesinambungan. Ketidakkonsistenan kebijakan justru menimbulkan ketidakpastian yang mengganggu proses perencanaan, menyebabkan pemborosan sumber daya, serta menurunkan motivasi guru dan tenaga kependidikan.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Imma Rahmani, "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Pamulang Law Review* 5, no. 1 (15 Agustus 2022): 77–84, <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23611>.

<sup>3</sup> Nur Rulifatur Rohmah, "KONSEP MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM," *CERMIN: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara* 2, no. 1 (2022): 36–44.

<sup>4</sup> Rambat Nur Sasongko, "DETERMINAN TINGKAT PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI BERBAGAI JENJANG SEKOLAH," *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana* 13, no. 1 (30 April 2019), <https://doi.org/10.33369/mapen.v13i1.7356>.

<sup>5</sup> Yanti Puspita dan Cucu Atikah, "ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DARI KURIKULUM 2013 KE KURIKULUM MERDEKA," *NOKEN: Jurnal Pengelolaan Pendidikan* 4, no. 1 (10 Juli 2023): 09–21, <https://doi.org/10.31957/noken.v4i1.2888>.

<sup>6</sup> Kristi Wulandari, Suci Rahmawati, dan Kasful Anwar Us, "Meningkatkan Kualitas Pendidikan Serta Prinsip Penting Dalam Guru Dan Manajemen Pendidikan," *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi* 2, no. 02 (17 Februari 2024): 464–72, <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i02.660>.

<sup>7</sup> Dady Supiyadi, "PENERAPAN STRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA YANG EFEKTIF DAN BERKELANJUTAN DI SEKOLAH UNTUK MENCIPTAKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS,"

Selain itu, kebijakan yang berubah-ubah juga berdampak pada proses pengembangan kurikulum di tingkat sekolah. Setiap perubahan kebijakan nasional seringkali diikuti dengan revisi besar-besaran terhadap kurikulum sekolah, termasuk perubahan standar kompetensi, indikator pencapaian, hingga metode evaluasi. Hal ini tentu memerlukan penyesuaian yang tidak sedikit, baik dari sisi administrasi sekolah maupun dari sisi pembelajaran di kelas. Guru harus segera beradaptasi dengan materi baru, seringkali tanpa pelatihan yang memadai. Tidak jarang, ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan baru menyebabkan ketidaksinkronan antara tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar siswa.<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia di sekolah, ketidakkonsistenan kebijakan juga membawa dampak serius. Misalnya, perubahan dalam sistem rekrutmen dan pengangkatan guru, seperti peralihan dari program guru kontrak, honorer daerah, hingga program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sering membingungkan pihak sekolah.<sup>9</sup> Proses ini bukan hanya berdampak pada kontinuitas pengajaran, tetapi juga pada stabilitas internal sekolah. Guru yang merasa statusnya tidak pasti cenderung mengalami penurunan motivasi kerja, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa.

Dalam hal pengelolaan keuangan sekolah, ketidakkonsistenan dalam kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga kerap menjadi persoalan.<sup>10</sup> Ketentuan yang berubah-ubah tentang juknis (petunjuk teknis) BOS menyebabkan kepala sekolah harus sering merevisi rencana penggunaan dana, bahkan kadang-kadang menghambat pelaksanaan program-program prioritas sekolah. Akibatnya, tujuan utama dana BOS untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan tidak dapat tercapai secara optimal.

Ketidastabilan kebijakan juga berimbas pada hubungan eksternal sekolah, terutama dengan orang tua siswa dan masyarakat. Ketika sekolah harus sering melakukan perubahan mendadak terhadap sistem pembelajaran, kalender akademik, atau sistem evaluasi, orang tua dan masyarakat menjadi bingung dan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan. Ini bertolak belakang dengan prinsip manajemen pendidikan yang menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas sebagai pilar keberhasilan pendidikan.<sup>11</sup>

Jika kondisi ketidakkonsistenan ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi krisis kepercayaan terhadap sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan pendidikan yang konsisten, berjangka panjang, berbasis bukti, serta

---

*Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 1 (27 Februari 2025): 3083–90, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.43251>.

<sup>8</sup> Puspita dan Atikah, “ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DARI KURIKULUM 2013 KE KURIKULUM MERDEKA.”

<sup>9</sup> Linda Zakiah, Andi Mulyadi, dan Dine Meigawati, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PADA GURU HONORER DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2021,” *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 2 (27 November 2023): 102–16, <https://doi.org/10.31602/as.v8i2.12280>.

<sup>10</sup> Firmansyah Hidayat dan Ismail Tolla, “TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS),” *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)* 3, no. 1 (20 September 2022): 66–74, <https://doi.org/10.26858/jak2p.v3i1.16167>.

<sup>11</sup> Rohmah, “KONSEP MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM.”

fleksibel dalam menghadapi dinamika global tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan yang baik.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada analisis mengenai bagaimana konsistensi kebijakan pendidikan berkontribusi terhadap efektivitas manajemen pendidikan di tingkat sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya kesinambungan kebijakan bagi terciptanya sistem pendidikan yang kuat dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan memahami keterkaitan antara kebijakan dan manajemen pendidikan, diharapkan akan muncul rekomendasi kebijakan yang lebih baik, yang tidak hanya berpihak kepada kepentingan jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada kemajuan pendidikan nasional yang berkelanjutan.

## **Pembahasan**

### **Konsistensi Kebijakan sebagai Landasan Stabilitas Manajemen Pendidikan**

Konsistensi dalam kebijakan pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam menjaga stabilitas manajemen pendidikan di tingkat sekolah. Kebijakan yang jelas dan tidak berubah-ubah memberikan arah yang pasti bagi para pengelola sekolah, sehingga mereka dapat merencanakan dan melaksanakan program-program pendidikan dengan lebih efektif. Tanpa adanya kepastian ini, pengelola sekolah akan kesulitan dalam mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan pengembangan program.<sup>13</sup>

Kebijakan yang sering berubah akan menambah ketidakpastian dan memperberat beban administratif bagi pengelola sekolah. Dengan kebijakan yang tidak stabil, banyak waktu dan tenaga yang terbuang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, mengalihkan perhatian dari perencanaan dan pelaksanaan yang lebih penting. Hal ini tidak hanya menghambat kinerja administratif, tetapi juga mengurangi kesempatan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, keberhasilan manajemen pendidikan sangat bergantung pada lingkungan kebijakan yang stabil. Kebijakan yang konsisten akan menciptakan iklim yang mendukung pengembangan institusi pendidikan, memberi ruang bagi inovasi, dan memungkinkan sekolah untuk fokus pada pencapaian tujuan pendidikan jangka panjang. Sebuah kebijakan yang stabil adalah fondasi yang kuat bagi perkembangan institusi pendidikan, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi kualitas pendidikan di seluruh tingkat.<sup>15</sup>

Manajemen pendidikan memerlukan ruang gerak yang cukup untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program pengembangan sekolah dengan efektif. Dalam konteks ini, konsistensi kebijakan menjadi elemen penting yang memungkinkan sekolah untuk merancang visi dan misi jangka panjang, serta menyusun program kerja tahunan

---

<sup>12</sup> Usman Raidar, "BIROKRASI DALAM NEGARA DEMOKRASI: KERANCUAN TANGGUNG JAWAB DAN KRISIS KEPERCAYAAN," *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)* 1, no. 2 (21 Agustus 2023): 61–66.

<sup>13</sup> Ari Hasan Anshori, "PENTINGNYA MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH/MADRASAH DALAM KEPEMIMPINAN SEKOLAH/MADRASAH EFEKTIF" 2, no. 01 (2016).

<sup>14</sup> Moch Charis Hidayat dan Aldo Redho Syam, "Urgensitas perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya manusia madrasah era revolusi industri 4.0," *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education* 4, no. 1 (1 Januari 2020): 1–13, <https://doi.org/10.24269/ajbe.v4i1.2100>.

<sup>15</sup> Dina Maulidatul Hasanah dkk., "Model Pengelolaan Konflik Di Lembaga Pendidikan Islam," *Reflection : Islamic Education Journal* 1, no. 4 (5 November 2024): 97–112, <https://doi.org/10.61132/reflection.v1i4.174>.

yang terarah dan terukur. Dengan adanya kepastian dalam regulasi, kepala sekolah dan guru dapat fokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, tanpa harus terganggu oleh perubahan mendadak dalam standar kurikulum, sistem evaluasi, atau alokasi anggaran. Hal ini memungkinkan mereka untuk merencanakan dan melaksanakan program yang berkelanjutan, serta memberikan ruang bagi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Stabilitas kebijakan juga memperkuat rasa percaya diri lembaga pendidikan dalam menjalankan otonomi pengelolaan sekolah, karena mereka tahu bahwa kebijakan yang diterapkan akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar.<sup>16</sup> Dengan kepastian regulasi, kepala sekolah dan guru dapat berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran tanpa harus terganggu oleh perubahan mendadak dalam standar kurikulum, sistem evaluasi, atau alokasi anggaran. Stabilitas kebijakan juga memperkuat rasa percaya diri lembaga pendidikan dalam menjalankan otonomi pengelolaan sekolah.<sup>17</sup>

Sebaliknya, ketidakkonsistenan kebijakan sering kali memaksa sekolah untuk terus-menerus melakukan penyesuaian yang menguras energi dan sumber daya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk tujuan pendidikan yang lebih produktif. Perubahan mendadak dalam kebijakan kurikulum atau evaluasi, misalnya, membuat sekolah harus merevisi perencanaan pembelajaran, melatih ulang guru, dan merancang ulang indikator capaian pendidikan. Hal ini berdampak langsung pada penurunan efektivitas program, karena waktu dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan terbuang untuk mengikuti perubahan yang tidak terduga. Lebih jauh lagi, ketidakkonsistenan kebijakan ini dapat menyebabkan kelelahan organisasi (*organizational fatigue*) di kalangan tenaga pendidik dan pengelola sekolah. Kelelahan ini muncul karena tenaga pendidik harus terus beradaptasi dengan perubahan yang sering terjadi, yang pada akhirnya mengurangi motivasi dan semangat mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari. Perubahan kebijakan yang tidak terprediksi juga menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan performa institusi pendidikan, karena membuat lembaga pendidikan tidak dapat fokus pada pengembangan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Konsistensi kebijakan juga berimplikasi langsung pada terciptanya budaya organisasi yang sehat di sekolah.<sup>18</sup> Dengan adanya kepastian regulasi, sekolah dapat membangun budaya kerja yang berfokus pada pencapaian mutu, kolaborasi, dan inovasi. Guru dan staf dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap program pengembangan profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sementara siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih stabil dan berkesinambungan. Dalam lingkungan yang konsisten, kolaborasi antar guru dan staf dapat terjalin lebih erat, karena mereka merasa didukung oleh kebijakan yang sama dan tidak perlu mengalihkan perhatian mereka untuk beradaptasi dengan perubahan yang tidak menentu. Dalam jangka panjang, konsistensi kebijakan juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, karena mereka melihat adanya keteraturan dalam pengelolaan

<sup>16</sup> Riani Prihatini Ishak dkk., *Keterampilan Manajerial* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

<sup>17</sup> Jejen Musfah, *Kepemimpinan Pendidikan: Teori dan Kebijakan* (Prenada Media, 2022).

<sup>18</sup> Zuliana dkk., *Administrasi Pendidikan: Tinjau Konsep, Teori, dan Praktik* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022). 148.

dan perbaikan kualitas pendidikan.<sup>19</sup> Kepercayaan masyarakat ini pada akhirnya akan mempercepat tercapainya tujuan nasional di bidang pendidikan, karena masyarakat cenderung lebih mendukung lembaga pendidikan yang stabil dan dapat diandalkan dalam memberikan pendidikan yang berkualitas.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsistensi kebijakan pendidikan bukan hanya mendukung stabilitas manajemen di tingkat operasional, tetapi juga berperan dalam membangun fondasi budaya organisasi yang adaptif dan berorientasi pada kualitas. Tanpa adanya kebijakan yang konsisten, sekolah akan kesulitan untuk mencapainya, dan proses pengembangan pendidikan akan terhambat. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kesinambungan dan keberlanjutan setiap regulasi yang diterapkan. Formulasi kebijakan berbasis bukti dan hasil evaluasi yang komprehensif menjadi kunci untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mengakomodasi kebutuhan pendidikan saat ini, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.

### **Dampak Ketidakkonsistenan Kebijakan terhadap Kinerja Manajemen Sekolah**

Ketidakkonsistenan kebijakan pendidikan membawa dampak signifikan terhadap seluruh aspek kinerja manajemen sekolah. Setiap perubahan kebijakan yang mendadak menuntut sekolah untuk melakukan penyesuaian cepat dalam berbagai bidang, mulai dari perencanaan program, implementasi pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar. Akibatnya, sekolah sering mengalami disorientasi dalam menentukan prioritas kerja, karena orientasi kebijakan yang berubah-ubah menghambat kesinambungan pengelolaan program yang telah dirancang sebelumnya. Hal ini memperburuk upaya sekolah untuk menjaga mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam aspek perencanaan, perubahan kebijakan yang tidak terduga menyebabkan sekolah harus mengubah dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) maupun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM). Revisi berulang terhadap rencana ini tidak hanya membebani kerja administratif kepala sekolah dan staf, tetapi juga menghambat implementasi program-program inovatif yang telah dipersiapkan. Rencana strategis sekolah menjadi kurang efektif karena harus terus disesuaikan dengan kebijakan baru, sehingga tujuan jangka panjang pendidikan sulit tercapai secara optimal.<sup>21</sup>

Dari sisi pelaksanaan, perubahan kebijakan sering kali mengakibatkan ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menyesuaikan proses pembelajaran. Guru dituntut untuk segera mengadopsi kurikulum baru atau metode pembelajaran yang belum sempat dipahami secara mendalam. Kondisi ini berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas yang menjadi tidak

---

<sup>19</sup> Ulil Amri, Rifma Rifma, dan Syahril Syahril, "Konsistensi Kebijakan Pendidikan di Indonesia," *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 3, no. 5 (1 Juli 2021): 2200–2205, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.778>.

<sup>20</sup> Mahmud Sani, "Strategi Membangun Kepercayaan Masyarakat pada Pendidikan Dasar Islam," *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 7, no. 1 (5 Februari 2018): 49, <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v7i1.159>.

<sup>21</sup> Affan dkk., "Penyusunan Program Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendidikan," *AL-MUTSLA* 6, no. 2 (31 Desember 2024): 491–501, <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2.1364>.

optimal. Guru yang mengalami overload karena perubahan kebijakan berulang dapat kehilangan motivasi, yang akhirnya berdampak pada menurunnya kinerja akademik siswa. Perubahan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kesiapan pelaksana di lapangan dapat berujung pada kegagalan implementasi.<sup>22</sup>

Dalam aspek evaluasi, ketidakkonsistenan kebijakan menyebabkan ketidakjelasan indikator keberhasilan pendidikan yang harus dicapai sekolah. Misalnya, perubahan dari Ujian Nasional ke Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) tanpa transisi yang matang membuat sekolah mengalami kebingungan dalam menyiapkan siswa dan mengevaluasi capaian belajar mereka.<sup>23</sup> Hal ini berdampak pada kualitas evaluasi internal sekolah yang menjadi tidak sinkron dengan standar nasional, sehingga sulit untuk mengukur efektivitas program pembelajaran yang sudah berjalan.

Secara keseluruhan, ketidakkonsistenan kebijakan memperburuk iklim manajerial di sekolah, menciptakan ketidakpastian organisasi, menurunkan motivasi kerja tenaga pendidik, dan memperlambat laju peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, stabilitas dalam pembuatan dan implementasi kebijakan pendidikan sangat dibutuhkan untuk memastikan kinerja manajemen sekolah berjalan efektif dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, dinas pendidikan, dan sekolah untuk membangun kerangka kebijakan yang lebih konsisten dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

### **Strategi Adaptasi Sekolah terhadap Ketidakkonsistenan Kebijakan**

Menghadapi realitas ketidakkonsistenan kebijakan pendidikan, sekolah-sekolah perlu mengembangkan berbagai strategi adaptasi agar tetap mampu menjalankan fungsi manajerial secara efektif. Adaptasi ini menjadi penting untuk menjaga kesinambungan program pendidikan serta meminimalisir dampak negatif dari perubahan kebijakan yang tidak terduga. Sekolah yang berhasil bertahan adalah sekolah yang mampu membangun kapasitas internalnya, meningkatkan fleksibilitas dalam perencanaan, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Organisasi yang adaptif mampu mempertahankan kinerjanya bahkan dalam situasi perubahan yang dinamis.<sup>24</sup>

Salah satu strategi utama yang diterapkan sekolah adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Guru dan tenaga kependidikan didorong untuk memperkaya kompetensi mereka, tidak hanya dalam bidang pedagogik, tetapi juga dalam manajemen perubahan. Dengan meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap kebijakan baru, sekolah dapat mempercepat proses transisi dan mengurangi resistensi internal. Selain itu, pengembangan komunitas belajar profesional

---

<sup>22</sup> Sasongko, "DETERMINAN TINGKAT PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI BERBAGAI JENJANG SEKOLAH."

<sup>23</sup> Achmat Taufiq dkk., "Kebijakan Pemerintah pada Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional (UN)," *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 9 (1 September 2024): 9498–9504, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5355>.

<sup>24</sup> Andriya Risdwiyanto, "High-Performance Organization untuk Menghadapi Turbulensi Lingkungan Bisnis," *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship* 7, no. 1 (31 Desember 2017): 73, <https://doi.org/10.30588/jmp.v7i1.324>.

(professional learning community) antar guru juga menjadi sarana efektif untuk saling berbagi strategi adaptasi terhadap perubahan kebijakan.<sup>25</sup>

Strategi lain yang penting adalah penerapan perencanaan berbasis skenario.<sup>26</sup> Dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan, sekolah perlu menyusun beberapa alternatif rencana kerja yang disesuaikan dengan berbagai kemungkinan perubahan regulasi. Perencanaan berbasis skenario ini memungkinkan sekolah untuk tetap bergerak secara strategis, meskipun kebijakan berubah sewaktu-waktu. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat mengurangi keterkejutan organisasi (organizational shock) dan tetap menjaga kelangsungan program-program prioritasnya.

Akhirnya, pembangunan budaya organisasi yang adaptif menjadi fondasi utama dalam menghadapi ketidakkonsistenan kebijakan. Sekolah perlu menanamkan nilai-nilai fleksibilitas, inovasi, dan kesiapsiagaan perubahan di antara seluruh anggota komunitasnya. Dengan budaya yang adaptif, perubahan kebijakan tidak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Budaya ini juga mendorong sikap proaktif dalam menghadapi tantangan, mempercepat proses inovasi di sekolah, dan pada akhirnya memperkuat efektivitas manajemen pendidikan di tengah ketidakpastian.

### **Pentingnya Formulasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Bukti**

Formulasi kebijakan pendidikan berbasis bukti (evidence-based policy) menjadi semakin penting dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kebijakan yang disusun berdasarkan data empiris, hasil penelitian, dan evaluasi lapangan mampu menghasilkan keputusan yang lebih akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks manajemen pendidikan, pendekatan berbasis bukti memberikan landasan kuat bagi sekolah untuk melaksanakan program-program pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Penggunaan bukti dalam proses pembuatan kebijakan meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut.<sup>27</sup>

Sering kali, perubahan kebijakan yang tidak konsisten terjadi karena kurangnya dasar analisis empiris yang mendalam. Kebijakan yang hanya didasarkan pada tekanan politik, opini publik sesaat, atau asumsi tanpa data dapat menyebabkan kebingungan di tingkat implementasi. Oleh sebab itu, formulasi kebijakan berbasis bukti menuntut pemerintah untuk mengintegrasikan hasil riset pendidikan, data statistik nasional, serta evaluasi program-program sebelumnya ke dalam proses perumusan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tahan terhadap dinamika sosial-politik dan mampu memberikan arah yang lebih stabil bagi manajemen pendidikan di sekolah.

Selain itu, pendekatan berbasis bukti mendorong adanya siklus kebijakan yang adaptif dan reflektif. Artinya, setiap implementasi kebijakan dievaluasi secara sistematis untuk

---

<sup>25</sup> Wulandari, Rahmawati, dan Us, "Meningkatkan Kualitas Pendidikan Serta Prinsip Penting Dalam Guru Dan Manajemen Pendidikan."

<sup>26</sup> "Perencanaan skenario: strategi, teknik, & contoh [2024]," diakses 3 Mei 2025, [https://www.cubesoftware.com.translate.google/blog/scenario-planning?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sge](https://www.cubesoftware.com.translate.google/blog/scenario-planning?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge).

<sup>27</sup> Meysha Ananda Putri, "Strategi Pengelolaan Kebijakan untuk Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Kota Bengkulu," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (10 Desember 2024): 130–43, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.675>.

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, sehingga proses perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi berbasis data ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk tidak terburu-buru melakukan perubahan mendasar, melainkan mengutamakan perbaikan bertahap (incremental change) yang lebih stabil bagi dunia pendidikan.<sup>28</sup> Hal ini penting untuk menjaga kontinuitas program-program di sekolah dan menghindari gangguan besar terhadap manajemen pendidikan.

Dalam prakteknya, formulasi kebijakan berbasis bukti membutuhkan kolaborasi erat antara akademisi, praktisi pendidikan, birokrat, dan komunitas sekolah. Penelitian-penelitian pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah dapat menjadi sumber informasi berharga dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, keterlibatan langsung pihak sekolah sebagai pelaksana di lapangan memungkinkan munculnya kebijakan yang lebih kontekstual, responsif, dan aplikatif. Melalui mekanisme partisipatif ini, kebijakan pendidikan dapat lebih mencerminkan kebutuhan nyata dan tantangan yang dihadapi di tingkat sekolah.

Dengan demikian, formulasi kebijakan pendidikan berbasis bukti menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan manajemen pendidikan yang stabil, efektif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak hanya dapat menghindari ketidakkonsistenan kebijakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, investasi dalam riset pendidikan, penguatan sistem evaluasi, serta peningkatan kapasitas analisis kebijakan di lembaga pemerintahan menjadi langkah strategis dalam membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik.

## **Penutup**

Konsistensi kebijakan pendidikan terbukti menjadi faktor fundamental dalam menciptakan efektivitas manajemen pendidikan di tingkat sekolah. Kebijakan yang stabil dan berkesinambungan memberikan ruang bagi sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pendidikan secara terarah dan berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakkonsistenan kebijakan menimbulkan ketidakpastian, memperbesar beban administratif, serta menghambat inovasi dan peningkatan mutu pendidikan.

Dampak ketidakkonsistenan kebijakan dirasakan secara nyata dalam berbagai aspek manajemen sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ketidakpastian ini tidak hanya memperlambat pencapaian tujuan pendidikan, tetapi juga melemahkan motivasi dan kinerja tenaga pendidik. Oleh karena itu, sekolah dituntut untuk mengembangkan berbagai strategi adaptasi, seperti memperkuat kapasitas sumber daya manusia, merancang perencanaan berbasis skenario, membangun komunikasi efektif, dan menanamkan budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan.

Di sisi lain, formulasi kebijakan pendidikan yang berbasis bukti menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Pendekatan ini menjamin bahwa setiap kebijakan disusun atas dasar analisis empiris yang kuat, kebutuhan nyata di lapangan, serta hasil evaluasi program-program

---

<sup>28</sup> La Ramah, "Evaluasi raport pendidikan dan perencanaan berbasis data meningkatkan mutu layanan pendidikan," *TIFAPOS.id* (blog), 29 April 2025, <https://tifapos.id/evaluasi-raport-pendidikan-dan-perencanaan-berbasis-data-meningkatkan-mutu-layanan-pendidikan/>.

sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan, efektif, dan mampu memberikan stabilitas yang dibutuhkan bagi manajemen pendidikan di tingkat sekolah.

Sebagai implikasi praktis, pembuat kebijakan perlu memperhatikan kesinambungan, kredibilitas, serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam setiap tahap perumusan kebijakan pendidikan. Investasi pada penelitian pendidikan, penguatan kapasitas analisis kebijakan, serta penerapan sistem evaluasi kebijakan yang sistematis harus menjadi prioritas dalam upaya memperbaiki tata kelola pendidikan nasional. Melalui konsistensi kebijakan yang berbasis bukti, diharapkan manajemen pendidikan di sekolah dapat berjalan lebih efektif, inovatif, dan berkontribusi pada tercapainya tujuan pendidikan nasional secara optimal.

### Daftar Pustaka

- Affan, Siradjuddin, Alwan Suban, dan Nurul Fauziyah. "Penyusunan Program Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendidikan." *AL-MUTSLA* 6, no. 2 (31 Desember 2024): 491–501. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2.1364>.
- Amri, Ulil, Rifma Rifma, dan Syahril Syahril. "Konsistensi Kebijakan Pendidikan di Indonesia." *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 3, no. 5 (1 Juli 2021): 2200–2205. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.778>.
- Anshori, Ari Hasan. "PENTINGNYA MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH/MADRASAH DALAM KEPEMIMPINAN SEKOLAH/MADRASAH EFEKTIF" 2, no. 01 (2016).
- Hasanah, Dina Maulidatul, Nur Izsasi Aminah Haryanti, Putri Anadatul Ustazia, dan Mu'alimin Mu'alimin. "Model Pengelolaan Konflik Di Lembaga Pendidikan Islam." *Reflection : Islamic Education Journal* 1, no. 4 (5 November 2024): 97–112. <https://doi.org/10.61132/reflection.v1i4.174>.
- Hidayat, Firmansyah, dan Ismail Tolla. "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)." *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)* 3, no. 1 (20 September 2022): 66–74. <https://doi.org/10.26858/jak2p.v3i1.16167>.
- Hidayat, Moch Charis, dan Aldo Redho Syam. "Urgensitas perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya manusia madrasah era revolusi industri 4.0." *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education* 4, no. 1 (1 Januari 2020): 1–13. <https://doi.org/10.24269/ajbe.v4i1.2100>.
- Ishak, Riani Prihatini, Loso Judijanto, Darmayasa Darmayasa, Apriyanto Apriyanto, Zamroni Zamroni, Naufal Muhammad Agil, Akhmad Ramli M, dkk. *Keterampilan Manajerial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Meysa Ananda Putri. "Strategi Pengelolaan Kebijakan untuk Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Kota Bengkulu." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (10 Desember 2024): 130–43. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.675>.
- Musfah, Jejen. *Kepemimpinan Pendidikan: Teori dan Kebijakan*. Prenada Media, 2022.
- Puspita, Yanti, dan Cucu Atikah. "ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DARI KURIKULUM 2013 KE KURIKULUM MERDEKA." *NOKEN : Jurnal Pengelolaan Pendidikan* 4, no. 1 (10 Juli 2023): 09–21. <https://doi.org/10.31957/noken.v4i1.2888>.

- Rahmani, Imma. "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Pamulang Law Review* 5, no. 1 (15 Agustus 2022): 77–84. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23611>.
- Raidar, Usman. "BIROKRASI DALAM NEGARA DEMOKRASI: KERANCUAN TANGGUNG JAWAB DAN KRISIS KEPERCAYAAN." *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)* 1, no. 2 (21 Agustus 2023): 61–66.
- Risdwiyanto, Andriya. "High-Performance Organization untuk Menghadapi Turbulensi Lingkungan Bisnis." *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship* 7, no. 1 (31 Desember 2017): 73. <https://doi.org/10.30588/jmp.v7i1.324>.
- Rohmah, Nur Rulifatur. "KONSEP MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM." *CERMIN: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara* 2, no. 1 (2022): 36–44.
- Sani, Mahmud. "Strategi Membangun Kepercayaan Masyarakat pada Pendidikan Dasar Islam." *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 7, no. 1 (5 Februari 2018): 49. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v7i1.159>.
- Sasongko, Rambat Nur. "DETERMINAN TINGKAT PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI BERBAGAI JENJANG SEKOLAH." *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana* 13, no. 1 (30 April 2019). <https://doi.org/10.33369/mapen.v13i1.7356>.
- Supiyadi, Dady. "PENERAPAN STRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA YANG EFEKTIF DAN BERKELANJUTAN DI SEKOLAH UNTUK MENCIPTAKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 1 (27 Februari 2025): 3083–90. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.43251>.
- Taufiq, Achmat, Rahmadani Tri Susanto, Rizki Bangkit Prayugo, dan Gita Fitri Ramadhani. "Kebijakan Pemerintah pada Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional (UN)." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 9 (1 September 2024): 9498–9504. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5355>.
- Wulandari, Kristi, Suci Rahmawati, dan Kasful Anwar Us. "Meningkatkan Kualitas Pendidikan Serta Prinsip Penting Dalam Guru Dan Manajemen Pendidikan." *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi* 2, no. 02 (17 Februari 2024): 464–72. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i02.660>.
- Zakiah, Linda, Andi Mulyadi, dan Dine Meigawati. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) PADA GURU HONORER DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2021." *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 2 (27 November 2023): 102–16. <https://doi.org/10.31602/as.v8i2.12280>.
- Zuliana, Hengki Nurhuda, Undang Suryatno, Muwahidah Nurhasanah, Eliyana, Abdul Azis, Cepi Budiyo, dkk. *Administrasi Pendidikan: Tinjau Konsep, Teori, dan Praktik*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.